



**LAPORAN KINERJA  
WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM  
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020 - 2021  
(8 MARET 2021 S.D 5 MEI 2021)**

---

## **PENDAHULUAN**

Bidang Politik dan Keamanan (KORPOLKAM) sebagai bidang yang strategis di DPR RI membidangi ruang lingkup terkait Pertahanan, Luar Negeri. Komunikasi dan Informatika, Intelijen, Dalam Negeri, Sekertariat Negara, Pemilu, Hukum, HAM, dan Keamanan. Ruang Lingkup bidang Korpolkam yaitu Alat Kelengkapan Dewan berupa Komisi (termasuk Komisi I, Komisi II, Komisi III), Badan Kerjasama Antar Parlemen dan Badan Legislasi.

Sedangkan alokasi Waktu Rapat dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 yang dilaksanakan mulai tanggal 8 Maret 2021 s.d 5 Mei 2021. Sedangkan Masa Reses dimulai tanggal 10 April 2021 s.d 5 Mei 2021.

Adapun pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya yakni:

### **I. RAPAT-RAPAT DPR RI**

#### **1) RAPAT PARIPURNA DPR RI**

1. **Senin, 8 Maret 2021**, mengikuti Rapat Paripurna ke-14 dengan agenda Pidato Ketua DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021.
2. **Selasa, 23 Maret 2021**, mengikuti Rapat Paripurna Ke-15 dengan agenda:
  - a. Laporan Badan Legislasi DPR RI mengenai Penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.
  - b. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-negara Efta (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Efta States)
3. **Jumat, 9 April 2021**, mengikuti Rapat Paripurna Ke-16 dengan agenda:
  - a. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-negara Efta (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Efta States).

- b. Laporan Komisi XI DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (Fit And Proper Test) terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diajukan Bpk dan Menteri Keuangan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.
- c. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUUUsul Inisiatif Komisi III DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan Menjadi RUU Usul DPR RI
- d. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Ruu Usul Inisiatif Komisi X DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan Menjadi RUU Usul DPR RI
- e. Laporan BURT DPR RI tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2022 dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan
- f. Persetujuan Fraksi-Fraksi terhadap Pertimbangan Penggabungan dan Pembentukan Kementerian
- g. Pidato Penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2020-2021.

## **2) RAPAT PIMPINAN DPR RI.**

- 1. **Senin, 22 Maret 2021**, memimpin Rapat Pimpinan DPR RI dengan agenda membahas surat-surat masuk dan lain-lain.
- 2. **Kamis, 8 April 2021**, mengikuti Rapat Pimpinan DPR RI dengan agenda membahas surat-surat masuk dan lain-lain

## **3) RAPAT KONSULTASI DAN KOORDINASI PIMPINAN DPR RI.**

- 1. **Senin, 29 Maret 2021**, memimpin Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan BKSAP DPR RI dengan agenda pembahasan pelaksanaan Diplomasi Parlemen di Masa Pandemi.
- 2. **Senin, 29 Maret 2021**, memimpin Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan MKD dan Pimpinan Baleg DPR RI dengan agenda Pembahasan Tindak Lanjut Evaluasi dan Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI, Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik Sistem Pendukung DPR RI.
- 3. **Selasa, 30 Maret 2021**, memimpin Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPRI, Pimpinan Komisi I, Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI dengan Pejabat Kementerian Luar Negeri RI dengan agenda Membicarakan Pertimbangan atas Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.

## **4) RAPAT KONSULTASI PENGGANTI RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPR RI.**

- 1. **Kamis, 8 April 2021**, mengikuti Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI dengan agenda membahas:

- a. Surat Presiden RI Nomor: R-11/Pres/02/2021 tanggal 26 Februari 2021, perihal: Penyampaian nama-nama Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026
- b. Surat Presiden RI Nomor: R-12/Pres/03/2021 tanggal 23 Maret 2021, perihal: Rencana Pengesahan Protocol to Implement the Eight Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk melaksanakan paket komitmen kedelapan Bidang Jasa Keuangan dalam Bentuk Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di bidang Jasa).
- c. Surat Presiden Nomor: R-14/Pres/03/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal: Pertimbangan Perubahan Kementerian.
- d. Surat masuk dari Pimpinan Komisi XI DPR RI Nomor: 34/MS.IV/Kom.XI/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, hal: Permintaan Penjadwalan Dalam Rapat Bamus dan Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kantor Akuntan Publik.
- e. Surat masuk dari Pimpinan Komisi III DPR RI Nomor: 425-DW/KOM.III/MP.IV/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, hal: Pengusulan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- f. Surat masuk dari Pimpinan BURT DPR RI Nomor: AG/04190/DPR RI/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, hal: Permohonan Penjadwalan Laporan BURT pada Rapat Paripurna DPR RI.
- g. Surat Pimpinan DPD RI Nomor: PU.04/377/DPD RI/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, hal: Penyampaian Hasil Pengawasan DPD RI.
- h. Surat masuk dari Pimpinan Komisi I DPR RI Nomor: 066/Kom.I/MP.IV/IV/2021 tanggal 6 April 2021, hal: Permohonan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.
- i. Surat masuk dari Pimpinan Komisi VIII DPR RI Nomor: LG/5020/DPR RI/IV/2021 tanggal 7 April 2021, hal: Perpanjangan pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana.
- j. Penetapan Kunker Komisi I s.d XI DPR RI pada Reses MP.IV TS. 2020-2021.
- k. Penetapan alokasi waktu MP. V TS. 2020-2021.

## II. PENERIMAAN TAMU

### 1) **Senin, 8 Maret 2021, Menerima Audiensi Mahasiswa S2 Universitas Nasional**

Pada hari Senin, 8 Maret 2021 Pukul 15.30 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Audiensi Mahasiswa S2 Universitas Nasional atas nama Ricad Saka, dalam rangka wawancara mengenai penyusunan thesis dengan tema “Reformasi Parlemen Dalam Konteks Digital” yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Gedung Nusantara III Lantai 4. Pertemuan berlangsung tertutup.

## **2) Senin, 15 Maret 2021, Menerima Audiensi Sekjen Cricket Indonesia**

Pada hari Senin, 15 Maret 2021 Pukul 16.30 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Audiensi Sekjen Cricket Indonesia, Albert Tangkudung dalam rangka pembahasan program Persatuan Cricket Indonesia yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Gedung Nusantara III Lantai 4. Pertemuan berlangsung tertutup.

## **3) Selasa, 16 Maret 2021 Menerima Delegasi Kunjungan Kerja DPR Aceh**

Pada hari Selasa, 16 Maret 2021 pukul 14.30 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Kunjungan Kerja Delegasi DPR Aceh yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Aceh, Bapak Tgk Muhammad Yunus M. Yusuf dalam rangka membahas lanjutan penegasan Pilkada Aceh Serentak Tahun 2022 dan Percepatan Penetapan Rancangan Qanun Aceh tentang Pilkada dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Komisi I DPR Aceh menyampaikan diperlukannya kepastian terkait penyelenggaraan Pilkada Aceh Tahun 2022.
2. Kepastian terkait pelaksanaan Pilkada Aceh sangat penting, mengingat hal ini berkaitan dengan anggaran, pencalonan, dan proses tahapan yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP). Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sudah menerima surat perihal putusan atas sengketa Pilkada Aceh, namun sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai Pilkada Aceh.
3. Pimpinan DPR RI memahami pandangan dan masukan Komisi I DPR Aceh, dan selanjutnya meminta Komisi I DPR Aceh untuk mengirim surat resmi terkait Pilkada Tahun 2022 ke DPR RI, untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan dan prosedur perundang-undangan yang berlaku diantaranya melalui mekanisme Rapat Pimpinan DPR RI, Rapat Badan Musyawarah DPR RI, serta Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

## **III. KUNJUNGAN KERJA**

### **1) 13 – 15 Maret 2021, Kunjungan Kerja ke Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin memimpin kunjungan kerja ke Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang turut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Riau, H. Syamsuar dan Bupati Kabupaten Rokan Hilir H. Suyatno. Rombongan kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melakukan tinjauan ke Bagansiapiapi Kabupaten rokan hilir dan melaksanakan penyerapan aspirasi dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Bupati Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan, masyarakat setempat menginginkan pembangunan jalan lintas pesisir termasuk usulan jalan perbatasan Siaboi – Dumai. Usulan tersebut telah disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan tujuan untuk

mendapatkan persetujuan pinjam pakai pembangunan jalan yang dapat tembus ke Kota Dumai.

2. Lebih lanjut, Bupati Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan, aspirasi tersebut masih menemui penolakan dari PT. Diamont Raya Timber dan berharap tim kunjungan kerja dapat menyampaikan aspirasi masyarakat Rokan Hilir ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
3. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir akan dibawa ke Jakarta untuk selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

## 2) 21 – 27 Maret 2021, Kunjungan Kerja Muhibah ke Negara Turki

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin memimpin Kunjungan Kerja Muhibah ke Negara Turki, dalam rangka Memenuhi undangan sebagai pembicara dari Youth Break the Boundaries merupakan sebuah organisasi pelajar lintas negara di Istanbul. Undangan dimaksud, untuk menjadi salah satu pemateri dalam kegiatan *Istanbul Youth Summit 2021* yang diselenggarakan pada tanggal 22 – 25 Maret 2021, dengan peserta berasal dari Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Ekuador, Bangladesh dan Pakistan.

Dalam paparannya Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam menyampaikan materinya yang berjudul “*The Role of Good Governance in Creating Youth Future Leaders*”. Secara garis besar materi yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI adalah sebagai berikut:

- a. Peranan kepemimpinan sangat strategis dan penting dalam sebuah organisasi sebagai salah penentu keberhasilan dalam pencapaian misi, visi, dan tujuan suatu organisasi. Maka dari itu, tantangan dalam mengembangkan strategi organisasi yang jelas terutama terletak pada organisasi di satu sisi dan tergantung pada kepemimpinan.
- b. Pemimpin harus mampu memberikan wawasan, membangkitkan kebanggaan, serta menumbuhkan sikap hormat dan kepercayaan dari bawahannya.
- c. Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadian sendiri yang unik dan khas sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya dari orang lain.
- d. Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif, yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka searah dengan kemauan dan aspirasi pemimpin.
- e. Peran strategis seorang pemimpin dibutuhkan dalam situasi krisis dengan menjalankan manajemen krisis. Berbeda dengan manajemen risiko, yang melibatkan penilaian potensi ancaman dan menemukan cara terbaik untuk menghindari ancaman, manajemen krisis berurusan dengan ancaman sebelum, selama, dan setelah terjadi.
- f. Apa yang dibutuhkan para pemimpin selama krisis bukanlah rencana respons yang telah ditentukan sebelumnya tetapi perilaku dan pola pikir yang mencegah mereka bertindak berlebihan terhadap masa lalu dan membantu mereka melihat ke masa depan.

- g. Pendidikan adalah kunci sebab dengan adanya pendidikan yang baik dan memadai, negara mempersiapkan investasi jangka panjang kepada generasi mudanya untuk mempersiapkan tantangan yang akan datang di masa depan.

Pertemuan berlangsung dengan baik, beberapa pertanyaan yang disampaikan sebagai bahan diskusi diantaranya terkait:

- a. Pengembangan potensi dan penguatan motivasi.
- b. Persyaratan dan hal-hal teknis proses memperoleh beasiswa bagi pelajar Indonesia.
- c. Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia yang harus mendapat dukungan dari seluruh instansi. Adanya harapan dari peserta yang merupakan guru honorer agar kedepannya terdapat kebijakan yang memberikan peluang yang lebih kepada institusi pendidikan swasta dan para guru honorer untuk memperoleh fasilitas pengembangan potensi dan kualitas mengajar di luar negeri.
- d. Adanya usulan agar lembaga pendidikan informal dapat juga didaftarkan ke dinas pendidikan sehingga mendapat bantuan dana guna pengembangan pendidikan informal.



**Dokumentasi Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Bpk. Azis Syamsuddin dalam menyampaikan materinya yang berjudul *“The Role of Good Governance in Creating Youth Future Leaders”* pada event Youth Istanbul Summit 2021**

### **Pertemuan Watua DPR RI /Korpolkam beserta Tim Delegasi dengan Duta Besar RI untuk Negara Turki di Ankara beserta jajarannya**

Pada pertemuan Delegasi Wakil Ketua DPR RI dengan Dubes RI beserta jajarannya, Dubes RI menyampaikan overview perkembangan hubungan bilateral RI-Turki yakni Penyampaian visi misi KBRI, kegiatan prioritas KBRI di bidang politik, ekonomi (peningkatan volume perdagangan bilateral), sosial budaya (pertukaran misi kesenian), kekonsuleran (perlindungan WNI, Visa on Arrival), dan kerjasama pertahanan (perjanjian kerjasama industri pertahanan), dan kerjasama multilateral. Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPR RI

juga mendukung upaya kerjasama bilateral dalam berbagai bidang yang sedang dan akan dilakukan oleh Dubes RI.



**Dokumentasi pemberian cinderamata kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dari Dubes RI untuk Turki dalam pertemuan yang dilaksanakan di Wisma Duta KBRI Ankara Turki.**

### **3) 30 Maret – 1 April 2021, Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin memimpin kunjungan kerja ke Provinsi Papua yang turut diikuti oleh Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua, Trifena M. Tinal dalam rangka melakukan peninjauan terhadap kesiapan beberapa venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada ajang Pekan Olahraga Nasional XX di Papua dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam meninjau kesiapan beberapa venue Cabang Olahraga yang akan dipertandingkan dalam PON XX di Papua. Di antaranya Venue Cabang Olah Raga Cricket yang berada di Kabupaten Sentani, dan Stadion Lucas Enambe di Jayapura, yang akan menjadi arena untuk acara pembukaan POIN XX di Papua. Dalam kesempatan tersebut, Azis Syamsuddin menyampaikan sejumlah masukan dan dorongan kepada panitia penyelenggara untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, mengingat batas waktu penyelesaian yang semakin dekat.
2. Di sela-sela kunjungannya, M. Azis Syamsuddin, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Cricket Indonesia, menyempatkan diri untuk melantik jajaran pengurus Persatuan Cricket Indonesia Propinsi Papua untuk masa bakti 2021-2025.
3. Dalam sambutannya, Azis Syamsuddin menilai bahwa tanah Papua memiliki banyak potensi sumber daya manusia yang unggul, untuk dilibatkan dalam sejumlah cabang olahraga. Beliau meminta kepada pengurus untuk tidak tinggal diam, dan segera mencari bibit-bibit unggul untuk cabang olah raga Criket agar mampu bersaing dan mengharumkan nama bangsa baik di tingkat nasional, maupun di pentas internasional.

4. Selain itu, di tengah tekanan bencana Pandemi Covid 19, dan juga situasi politik-keamanan yang masih terus bereskalasi di Papua, Wakil Ketua DPR RI ingin secara langsung memastikan kesiapan sejumlah pihak yang berwenang, khususnya dalam urusan politik, hukum, dan keamanan

#### **4) 2 – 3 April 2021, Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin memimpin kunjungan kerja ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang turut diikuti oleh Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka melakukan tinjauan ke lokasi bom bunuh diri yang terjadi pada hari Minggu, 28 Maret 2021 oleh jaringan teroris di Gereja Katedral, Makassar yang telah menimbulkan terganggunya rasa keamanan setempat. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meninjau secara langsung lokasi bom bunuh diri yang diduga dilakukan oleh jaringan teroris di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI mendatangi Rumah Sakit Bhayangkara dan memberikan semangat serta memberikan bantuan guna meringankan beban keluarga korban salah satu korban luka, yaitu Cosmas Balalembang, yang merupakan petugas keamanan di Gereja Katedral.
2. Menyampaikan turut prihatin dan duka, serta menaruh simpati dan empati kepada gereja dan para jemaat Gereja Katedral Makassar. Dirinya berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Selanjutnya Wakil Ketua DPR RI juga menyampaikan pesan kepada pimpinan gereja dan jemaat untuk tidak takut dalam melakukan kegiatan ibadah, karena aparat keamanan akan melakukan penjagaan dan menjamin keamanan keselamatan para jemaat.
3. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan saling menghormati serta menghargai toleransi umat beragama yang ada di Indonesia, meskipun terjadi perbedaan keyakinan dalam beragama.
4. Menyampaikan bahwa ancaman kedaulatan negara dan terorisme saat ini bersifat nonmiliter, seperti radikalisme, narkoba dan siber. Oleh karenanya sistem keamanan dan pertahanan yang dilakukan pemerintah harus menempatkan seluruh lapisan dan *stakeholder* terkait.

#### **5) 16 – 19 April 2021, Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin memimpin kunjungan kerja ke Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka melakukan kunjungan ke lokasi banjir bandang yang menghantam Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 01.00 WITA. Bencana ini merupakan yang terbesar di dari sisi korban Jiwa, lebih dari 10 tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bencana yang pertama terjadi pada 3 November 2010. Terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, banjir ini mengakibatkan 31 orang meninggal dunia. Tak hanya korban meninggal, setidaknya ada 7 orang hilang. Kemudian banjir juga menyebabkan 27 orang luka-luka dan 159 rumah rusak.

Banjir yang kedua terjadi pada 11 April 2011. Banjir berlokasi di Kabupaten Belu yang mengakibatkan 3.277 rumah rusak. Banjir juga menyebabkan 14 fasilitas umum rusak. Berdasarkan data terakhir yang disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, terdapat lebih dari 68 orang yang meninggal dunia yang diantaranya warga Kabupaten Flores Timur, 11 di Kabupaten Lembata, 2 di Kabupaten Ende dan 11 lainnya di Kabupaten Alor. Setidaknya ada 938 Kepala keluarga (KK) yang terdampak. Jumlah tersebut setara dengan 2.655 jiwa orang yang terdampak dan hingga kini masih terus dalam pendataan. Kerugian materiil diantaranya 25 unit rumah rusak, 114 unit rumah rusak sedang, 17 rumah hanyut, 60 rumah terendam, 743 rumah terdampak. Kemudian ada 40 titik akses jalan tertutup pohon tumbang, 5 jembatan putus, 1 unit fasilitas umum terdampak dan 1 unit kapal tenggelam.

Lebih lanjut, dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan menyampaikan bantuan secara materiil maupun non materiil saat menyambangi posko dan dapur umum yang dibangun pihak Gereja Kristen Sumba (GKS), di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
2. Menyampaikan terima kasih dari semua unsur yang ada tanpa melihat warna ataupun golongan untuk membantu saudara-saudara yang sedang ditimpa bencana di Sumba Timur.
3. Mendorong pemulihan pasca-bencana dan sudah mendirikan pendopo baca dengan tujuan untuk menambah minat baca di Sumba Timur, mengingat bencana tersebut berdampak pada banyaknya tempat pendidikan yang rusak di wilayah setempat.
4. Wakil Ketua DPR RI /Korpolkam bersama Ikatan Alumni Trisakti (IKA TRISAKTI) membangun Pendopo Baca di Desa Tenau, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pendopo baca ini yang akan dilengkapi dengan jaringan internet (Wifi) dengan harapan dapat meningkatkan minat baca dan berprestasi. Langkah ini juga merupakan kepedulian dan gerakan pengabdian masyarakat sehingga dengan adanya pendopo baca, psikologis anak-anak Sumba dapat kembali pulih.

## **6) 20 – 22 April 2021, Kunjungan Kerja ke Provinsi Bengkulu**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin memimpin kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu dalam rangka menjadi narasumber pada acara Sosialisasi Peran Politik Anggaran di Masa Pandemi Covid-19 untuk Pemulihan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. Pada pertemuan berlangsung di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Bengkulu tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan, sebagai imbas dari kebijakan Kementerian Keuangan agar pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran DAU sebesar delapan persen, Pemprov Bengkulu harus melakukan *refocusing* anggaran hingga 105 miliar rupiah. Hal ini berakibat pada tertundanya banyak kegiatan disejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu yang bersumber dari DAU.

2. Dalam hal pemulihan ekonomi yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19, DPR RI berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya Pemerintah dengan mengambil beberapa peran sebagai berikut:
  - a. DPR mendorong Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan berbagai langkah yang efektif, baik melalui kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta instrumen fiskal maupun moneter, untuk segera mewujudkan harapan rakyat.
  - b. Mendukung Pemerintah dalam merealisasikan proyeksi perekonomian nasional pada tahun 2021 dapat tumbuh pada kisaran 4,5-5,5 persen.
  - c. Meminta pemerintah agar dapat memperhitungkan secara cermat berbagai kemungkinan dalam mengantisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang. Serta, menyediakan ruang fiskal yang antisipatif sehingga APBN 2021 dapat berjalan dengan efektif.
  - d. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar diarahkan untuk dapat menjangkau pemulihan pada sisi permintaan (demand side) dan pemulihan pada sisi penawaran (supply side). Sedangkan dalam pemulihan kehidupan sosial masyarakat, dibutuhkan upaya sosialisasi, edukasi, dan kedisiplinan bersama dalam menjalankan protokol kesehatan melawan Covid-19.
  - e. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 agar dapat dilaksanakan Pemerintah secara konsisten, terkoordinasi, dan tersosialisasi dengan baik, sehingga pelaksanaannya mendapat dukungan dari seluruh masyarakat luas.
  - f. DPR RI mendukung upaya Pemerintah melakukan reformasi, sebagaimana yang disampaikan pada Pembahasan Pendahuluan dalam KEM PPKF 2021 (Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal). Bahwa Pemerintah akan melakukan reformasi penganggaran, reformasi perpajakan dan PNBPN, reformasi TKDD (Transfer Daerah dan Dana Desa), reformasi kesehatan, reformasi pendidikan, dan reformasi perlindungan sosial.
  - g. DPR RI harus memastikan bahwa setiap langkah pemulihan sosial dan ekonomi nasional yang dilakukan telah memenuhi peraturan perundang-undangan, memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tata kelola yang baik, dan mencegah moral hazard.
3. Dalam rangka melaksanakan peran politik anggaran di masa Pandemi Covid-19 untuk pemulihan ekonomi di Provinsi Bengkulu, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyarankan agar sumber pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada APBN dan APBD tetapi juga bagaimana cara Pemda memperkuat iklim investasi daerah. Dengan demikian, daerah dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.
4. Selain itu, Pemda harus mendorong peran serta masyarakat. Penting digarisbawahi sektor swasta terutama dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan atau kemudahan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Pemda perlu melakukan penyesuaian atau refocusing terhadap APBD tahun anggaran 2021. Terutama dalam menekan kegiatan yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Bengkulu, akibat berkurangnya DAU hingga delapan persen. Lebih lanjut, realokasi dan refocusing delapan persen itu tetap harus memperhatikan tingkat kasus COVID-19 dan pelaksanaannya paling cepat dilakukan dalam tiga bulan ini.
6. Pemerintah Daerah tidak asal melakukan refocusing anggaran karena dukungan dana untuk penanganan pandemi COVID-19 itu harus memperhatikan tingkat kasus di daerah masing-masing.

#### IV. KEGIATAN LAIN-LAIN

**1) Selasa, 9 Maret 2021, Memimpin Rapat Intern Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan UU Terkait Otsus Aceh, Papua, Papua Barat dan D.I.Y.**

Pada hari Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 15.30, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memimpin Rapat Intern Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, dan D.I.Y dengan pokok acara pembahasan program kerja tim, dan rencana kunjungan kerja tim pada Masa Persidangan IV Tahun 2020-2021. Rapat dilaksanakan secara tertutup.

**2) Rabu, 10 Maret 2021, Menjadi Keynote Speaker pada Webinar Nasional Forpimnas**

Pada hari Rabu, 10 Maret 2021 Pukul 09.50 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan *Keynote Speech* pada Webinar Nasional Forpimnas yang mengangkat tema "Forum Pemimpin Muda Nasional" dan menyampaikan beberapa pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Pemuda merupakan pemimpin masa depan, maka masa depan bangsa ke depan tergantung pemuda saat ini. Lalu bagaimana pemuda saat ini yang disebut sebagai generasi millennial. Saatnya kepemimpinan bangsa diambil alih oleh pemuda.
2. Pemuda harus dapat bertindak sebagai kekuatan moral, dimana kepentingan bangsa dan negara diletakkan di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Hal ini bisa dilakukan melalui:
  - a. Ditumbuhkembangkan nilai-nilai etika dan moralitas dalam setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
  - b. Memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual, serta meningkatkan kesadaran hukum, sehingga nilai-nilai etika dan moral tersebut harus mendasari setiap sikap dan tindakan.
3. Selain itu, pemuda juga harus berperan sebagai *agent of change* yang diwujudkan dengan mengembangkan:
  - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - b. sumberdaya ekonomi; kepedulian terhadap masyarakat;
  - c. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. olahraga, seni, dan budaya;
  - e. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - f. Pendidikan kewirausahaan; dan/atau kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

4. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan pentingnya bagi para pemuda mengingat kembali apa saja peranan pemuda dimasa sejarah tersebut juga penting sebelum mengetahui atau memahami peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa saat ini.

### **3) Selasa, 16 Maret 2021, Memimpin Rapat Intern Tim Implementasi Reformasi DPR RI**

Pada hari Selasa, 16 Maret 2021 Pukul 13.00 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memimpin Rapat Intern Tim Implementasi Reformasi DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3 beberapa pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam sebagai Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR RI (TIR) menyampaikan bahwa TIR merupakan kelanjutan dari pekerjaan DPR RI periode lalu. Secara bertahap Tim telah mengimplementasikan reformasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. Implementasi dimaksudkan agar ada kemudahan akses ke DPR RI oleh masyarakat secara luas, bersifat terbuka dan transparan dengan mengikuti perkembangan zaman. Cara yang dipilih adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi digital yang aman dan terjaga.
2. Selain membahas reformasi DPR RI, berkaitan dengan pengadaan IT dan sistem, beberapa hal lain yang menjadi perhatian dari TIR adalah:
  - a. Dukungan SDM yang mengikuti perkembangan;
  - b. Museum yang mendukung terbukanya informasi mengenai DPR RI kepada masyarakat;
  - c. Perpustakaan yang diperbaiki.
3. Perpustakaan tidak hanya menjadi kebutuhan DPR RI, tetapi juga publik. Untuk itu perpustakaan digital atau e-library sebaiknya dapat dimaksimalkan. Alih dokumen yang perlu dipustakakan mungkin dapat difasilitasi oleh Telkom karena mempunyai perangkat dan akses sendiri untuk alih dokumen tersebut. Untuk memahami format apa yang ditawarkan oleh Telkom, ada baiknya Telkom diundang untuk rapat bersama TIR.
4. Alun-Alun Demokrasi sudah mulai dirasakan kebutuhannya, dan dapat menjadi program prioritas dari TIR. Dalam hal pembuatan undang-undang, akhir-akhir ini sulit menampung respons publik yang tidak terfasilitasi. Jika Alun-Alun Demokrasi ini dapat diwujudkan, maka reaksi publik terhadap kinerja kelembagaan DPR dapat lebih terakomodasi.
5. Berbagai pemberitaan di media sosial dan media mainstream masih terus menyerang integritas DPR dari berbagai sisi. Untuk itu Kehumasan yang kredibel dan ICT yang terintegrasi menjadi salah satu hal yang menjadi prioritas di tengah maraknya kegiatan online.
6. Disepakati, bahwa Tim Implementasi Reformasi DPR RI akan melakukan rapat konsultasi dengan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional RI dalam rangka mendapatkan informasi tentang kesiapan Kalimantan Timur sebagai calon Ibukota Negara Indonesia. Disamping itu juga akan diundang Dirut PT. Telkom dan Kemenkominfo terkait e-library di DPR RI baik dari sisi hardware dan sisi muatan/konten.

#### **4) Rabu, 17 Maret 2021, Memimpin Rapat Intern Tim Open Parliament DPR RI**

Pada hari Rabu, 17 Maret 2021 Pukul 13.00 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memimpin Rapat Intern Tim Open Parliament DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3 beberapa pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam sebagai Ketua Tim Open Parliament DPR RI menyampaikan agenda dan maksud rapat yang bertujuan untuk membahas program kerja Open Parliament Indonesia (OPI), diantaranya:
  - a. Strategi implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Parlemen Indonesia OPI 2020 -2022 yang mencakup isu keterbukaan yang masih ada dalam DPR RI seperti perkembangan Sistem Informasi Legislasi (SILEG), penggunaan media dan proses partisipasi publik parlemen;
  - b. Menentukan fokus dan arahan isu Open Parliament Indonesia kedepannya;
  - c. Menentukan daerah dan negara kunjungan untuk melaksanakan studi banding praktek baik keterbukaan parlemen.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa upaya diplomasi parlemen bisa dilakukan melalui open parliament. Selama ini masyarakat masih merasakan parlemen kurang transparan dan kurang melibatkan masyarakat untuk melibatkan dalam proses penyusunan undang-undang. Seperti pelaksanaan BKSAP Day, kedepannya DPR RI bisa mengadakan Open Parliament Day yang akan bisa melibatkan masyarakat lebih luas dalam legislasi, kinerja dan kegiatan DPR RI. Selain itu kerjasama dengan media pemberitaan sangat penting. Mitra dalam RAN OPI 2020 - 2022 seperti AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) cukup penting untuk kerja sama parlemen kedepannya.
3. Salah satu komitmen dalam RAN OPI 2020 – 2022 terkait informasi Anggota DPR RI khususnya dalam website DPR RI yang masih belum lengkap. Untuk itu ketua menunjuk Kepala Pusat Data dan Informasi BDTI untuk menyusun surat edaran kepada staf dan Tenaga Ahli (TA) Anggota untuk mendorong pengisian informasi.
4. OPI sangat strategis untuk mengukuhkan posisi DPR RI di tingkat nasional dan internasional. Mendorong fungsi-fungsi dan yang menggapai masyarakat perlu dimaksimalkan untuk menunjukkan DPR RI sudah terbuka ke semua. Namun memang kanal-kanal informasi seperti SILEG dan proses partisipasi publik baik online maupun online belum berjalan secara maksimal. Salah satu hambatan adalah keterbatasan anggaran untuk infrastruktur IT dan dinamika politik dalam mendukung proses partisipasi politik.

#### **5) Kamis, 18 Maret 2021, Menjadi Narasumber dalam FGD Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia**

Pada hari Kamis, 18 Maret 2021 Pukul 10.00 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjadi narasumber pada *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dalam rangka menyerap aspirasi mengenai implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perlu atau tidaknya dilakukan revisi Undang-Undang pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa Pada 27 Oktober 2016 rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3).
2. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan tuntutan merevisi kembali Undang-Undang ITE diantaranya:
  - a. Terdapat Pasal “Karet” yakni Pasal 27 – 29 UU ITE dalam bab Kejahatan Siber yang menjadi persoalan utama;
  - b. Adanya pasal-pasal yang rawan untuk dipersoalkan, seperti Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 36 tentang Penghinaan dengan kerugian, Pasal 40 ayat 1 dan 2 tentang kewenangan penuh Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses pada muatan yang melanggar hukum; dan
  - c. Beberapa lapisan persoalan seperti rumusan pasal yang tidak ketat (karet) dan tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, serta dampak sosialnya dimana terdapat kerawanan menjadi ajang balas dendam, barter kasus, alat *shock therapy*, persekusi ekspresi, dan adanya ketakutan di masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka di ruang hukum.

#### **6) Senin, 5 April 2021, Memberikan Sambutan pada Pembukaan Ketua IKA Trisakti**

Pada hari Senin, 5 April 2021 pukul 15:00 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memberikan sambutan pada Pembukaan Ketua Ikatan Alumni Universitas Trisakti dan Seminar yang mengangkat tema “Vaksinasi dan Pemulihan Ekonomi” yang dilakukan secara daring dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa Pandemi Covid-19 yang sudah lebih dari satu tahun menimpa bangsa kita, telah melahirkan sejumlah dampak kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. DPR RI bersama dengan Pemerintah terus melakukan upaya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dalam rangka menanggulangi dampak Covid-19 khususnya di bidang sosial dan ekonomi.
2. DPR RI mendukung upaya Pemerintah dalam mendatangkan dosis Vaksin Covid-19, untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia.
3. DPR RI mendorong Pemerintah dan masyarakat untuk tetap mempertahankan disiplin protokol kesehatan, ditengah proses vaksinasi yang tengah dilakukan. Hal ini dilaksanakan dengan terus menerapkan budaya 4M dan 3T, yakni:
  - a. Mendorong masyarakat untuk tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan baik sebelum dan sesudah vaksin Covid-19.

- b. Mendorog tenaga kesehatan, dan seluruh *stakeholder* terkait untuk melakukan *tracing*, *testing*, dan *treatment* untuk meminimalisir penyebaran virus, dan sekaligus upaya pemulihan pasien positif Covid-19.

## **7) Rabu, 7 April 2021, Menjadi Pembicara pada Studium Generale Sivitas Akademika ITL Universitas Trisakti dan Satdik**

Pada hari Rabu, 7 April 2021 pukul 10:00 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjadi pembicara pada Studium Generale Sivitas Akademika ITL Universitas Trisakti dan Satdik yang mengangkat tema “Membangun Soliditas melalui Perwujudan Kolaborasi Quadropole Helix (Politician Leaders, Academician, Bussiness & Industry Societies, Government Officers) Keluarga Besar Trisakti, untuk Menyiapkan Generasi Bangsa NKRI yang Siap Menyongsong Indonesia Maju” dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan konsep *triple helix* yang merupakan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi telah terbukti dapat meningkatkan inovasi. Masing-masing peran dan kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha ini diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas dan inovasi. Peran penting inovasi dan kreatifitas ini merupakan modal dasar bagi industri kreatif untuk dapat lebih berkembang.
2. Adanya partisipasi masyarakat pada ada kolaborasi triple helix akan semakin memberikan dukungan dan pengaruh yang positif bagi tumbuh dan berkembangnya inovasi dan kreatifitas. Dimana Konsep Quadropole Helix merupakan pengembangan konsep triple helix dengan mengintegrasikan peran akademisi, pengusaha, pemerintah dan masyarakat ke dalam aktivitas kreatifitas dan pengetahuan.
3. Pendekatan Quadropole Helix akan dapat melahirkan kreativitas baru, ide dan ketrampilan serta pengetahuan baru dengan adanya dukungan antara akademisi, pebisnis, pemerintah dan masyarakat.
4. Dalam implementasi konsep Quadropole Helix Innovation di Universitas Trisakti, kerjasama antara Universitas dan Ikatan Alumni menjadi penting dilakukan.
  - a. Universitas menjadi pusat penelitian, dan pengembangan untuk menemukan konsep, formulasi dan sistem kolaborasi yang terbuka, inovatif, dan berkelanjutan.
  - b. Ikatan Alumni Trisakti, menjadi wadah berkumpulnya semua para alumni yang sekarang memegang peranan penting, baik di bidang pemerintahan, industri, dan sosial-politik tanah air.
5. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam lebih lanjut menyampaika Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Universitas dan Ikatan Alumni Trisakti harus membuka jaringan seluas mungkin sehingga memungkinkan bagi setiap elemen untuk melakukan kolaborasi dan memanfaatkan manfaat dari konsep Quadropole Helix Innovation yang dikembangkan.

## **8) Senin, 12 April 2021, Menjadi Pembicara pada Raisina Dialogue 2021**

Pada hari Senin, 12 April 2021 pukul 18:00 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjadi pembicara pada Seminar International “Raisina Dialogue 2021” yang diselenggarakan oleh *Observer Research Foundation* (ORF) yang juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri India dan mengangkat tema “*ViralWorld: Outbreaks, Outliers, and Out of Control*” dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa ditengah krisis Pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia, faktor komunikasi, keterbukaan, dan kerjasama diantara negara-negara menjadi sangat penting. Kerjasama internasional menjadi salah satu cara paling efektif dalam memerangi Pandemi, seperti melalui persiapan langkah-langkah dan manajemen mitigasi, strategi komunikasi ditengah krisis Pandemi, dan keterbukaan serta kerjasama antar negara dalam hal pengembangan vaksin.
2. Sebagai salah satu negara yang memegang peran penting dalam kawasan Indo-Pasifik, Indonesia fokus terhadap upaya-upaya yang komprehensif dalam hal kerjasama yang akan membantu dalam pembentukan berbagai resolusi, kerjasama di bidang ekonomi, dan meningkatkan konsep keamanan kolektif dan inklusivitas.
3. Dengan munculnya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis kesehatan global, negara – negara kini meyakini bahwa lawan dari satu negara bukan hanya dalam bentuk negara lain, namun juga dalam bentuk krisis perubahan iklim dan energy, Pandemi Covid-19, dan isu – isu yang memerlukan kerjasama internasional untuk diselesaikan, seperti isu lingkungan, serta penjaminan terhadap keamanan global.
4. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengapresiasi diselenggarakannya Raisina Dialogue 2021 dan berharap forum ini dapat meningkatkan kesadaran global, terhadap Pandemi yang tengah melanda dunia. Persamaan, kerjasama, dan hubungan antar negara dalam *framework* multilateralisme menjadi kunci dunia untuk segera terbebas dari krisis yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.
5. Lebih jauh, sebagai produsen vaksin terbesar di dunia, India menjadi salah satu harapan dunia dalam pemulihan kesehatan global, yang kemudian diharapkan untuk bermanfaat terhadap pemulihan perekonomian dunia.

## **9) Kamis, 22 April 2021, Menjadi Narasumber The 3<sup>rd</sup> NCOLS 2021 UPN Jakarta**

Pada hari Kamis, 22 April 2021 pukul 09:30 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjadi narasumber pada acara The 3<sup>rd</sup> National Conference on Law Studies & Call For Paper (NCOLS 2021) yang mengangkat tema “Membangun Sistem Hukum di Masa Pandemi Covid 19” dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa Pandemi Covid-19 telah melahirkan krisis kesehatan yang memberi dampak turunan yang terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak seperti ekonomi, sosial, birokrasi, pendidikan hingga lingkungan. Aspek penegakan hukum pun tidak

luput dari proses adaptasi dengan situasi pandemi Covid-19. Maka dari itu beberapa instansi penegak hukum turut membuat beberapa kebijakan.

2. Perubahan akibat pandemi Covid-19 menjadi pendorong lahirnya perubahan hukum yang dirancang untuk menata ulang tata kelola baru di berbagai bidang dengan basis perencanaan. Sedangkan perubahan yang dipicu oleh teknologi dan digitalisasi, melahirkan inovasi yang pengembangan dan penyebarannya jauh lebih dari sebelumnya, melalui mekanisme disruption.
3. DPR RI bersama Pemerintah telah merencanakan berbagai produk legislasi yang memiliki dimensi penataan ulang akibat dampak pandemik yang berorientasi terhadap perbaikan. Dampak konkret dari pandemi ini sedang dan akan terjadi di waktu-waktu mendatang. Tak ada pilihan lain selain melakukan penataan melalui instrumen hukum dengan senantiasa berpijak pada moral dan konstitusi.